Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis
Volume 14, Nomor 2, Mei 2023
P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Analisis Faktor Konfirmasi Indeks Pembangunan Manusia IndonesiaTahun 2019-2020

Confirmatory Factor Analysis of Indonesian HumanDevelopment Index 2019-2020

Nurul Hanifah[*)], **Rima Rachmawati**
Magister Akuntansi, Universitas Widyatama, Indonesia
**e-mail korespondensi: Hanifah.nurul@widyatama.ac.id*

Info Artikel

Riwayat Artikel :
Diterima: 9 Januari 2023
Disetujui: 16 April 2023
Dipublikasikan: Mei 2023

Nomor DOI :
10.33059/jseb.v14i2.7137

Cara Mensitasi :
Hanifah, N., & Rachmawati, R. (2023). Analisis faktor konfirmasi indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2019-2020. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, *14*(2), 304-317. doi: 10.33059/jseb.v14i2.7137.

Abstrak

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator sasaran pembangunan yang sangat penting untuk diperhatikan perkembangannya, karena menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja utama Dana Insentif Daerah (DID) dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020 persentase IPM Indonesia melambat sebesar 0,03 persen. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji dimensi yang perlu dikembangkan agar capaian IPM Indonesia terus meningkat. Penelitian deskriptif dan verifikatif ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan *confirmatory factor analysis*. Hasil penelitian ini menyatakan dimensi standar hidup layak memiliki kontribusi terkuat terhadap capaian IPM. Hasil lainnya bahwa Papua merupakan provinsi dengan standar hidup layak terendah di Indonesia yang dicerminkan oleh pengeluaran perkapitanya. Beberapa faktor yang menjadikan rendahnya standar hidup layak provinsi Papua yaitu tingginya tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan.

Kata Kunci: *Confirmatory Factor Analysis*, Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Manusia, Pengetahuan, Standar Hidup Layak.

Article Info

Article History :
Received: 9 January 2023
Accepted: 16 April 2023
Published: May 2023

DOI Number :
10.33059/jseb.v14i2.7137

How to Cite :
Hanifah, N., & Rachmawati, R. (2023). Analisis faktor konfirmasi indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2019-2020. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, *14*(2), 304-317. doi: 10.33059/jseb.v14i2.7137.

Abstract

The Human Development Index (IPM) is one of the development target indicators that is very important to pay attention to its development, because it is one of the main performance measurement indicators for Regional Incentive Funds (DID) in encouraging community welfare improvements. In 2020, Indonesia's HDI percentage slowed down by 0.03 percent. This research aims to examine the dimensions that need to be developed so that Indonesia's HDI achievements continue to increase. This descriptive and verification research uses a quantitative approach. Secondary data collected in this study were analyzed using confirmatory factor analysis. The results state that the dimension of a decent standard of living has the strongest contribution to HDI achievements. Another result is that Papua is a province with the lowest standard of living in Indonesia which is reflected in its per capita expenditure. Several factors contribute to the low standard of living in the province of Papua, namely the high unemployment rate and poverty rate.

Keywords: *Confirmatory Factor Analysis, Life Expectancy, Human Development Index, Knowledge, Decent Standard of Living.*

2614-1523/©2023 The Authors. Published by Fakultas Ekonomi Universitas Samudra.
This is an open access article under the CC BY-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

PENDAHULUAN

Pembangunan jika dipandang secara luas bermakna sebuah proses menuju perubahan dari kondisi tatanan kehidupan yang belum baik menuju ke arah yang lebih baik. Sasaran proses ini tertuju pada upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara (Hasan & Aziz, 2018) Secara umum, pembangunan ekonomi dianggap sebagai transformasi struktural ekonomi dengan memperkenalkan teknologi yang lebih mekanis dan mutakhir untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, lapangan kerja, pendapatan, dan standar hidup penduduk. Pembangunan ekonomi harus diiringi dengan perbaikan infrastruktur, serta faktor sosial, politik, dan kelembagaan untuk memfasilitasi transformasi ekonomi (Myint, 2016). Pembangunan ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, menanggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, yang mengacu pada peningkatan kualitas hidup manusia yang berasal dari pertumbuhan ekonomi yang berlangsung sangat lama (Acquah-Sam, 2021; Baeti, 2013) Salah satu indikator terpenting yang menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan itulah sebabnya saat ini pembangunan manusia senantiasa menjadi fokus utama.

Paradigma pembangunan manusia merupakan suatu proses memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*) yang dapat dilihat sebagai upaya ke arah perluasaan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1999). Salah satu cara untuk melakukan pengukuran terhadap kualitas manusia di suatu wilayah adalah melalui penilaian pembangunan manusia. Indikator yang digunakan yaitu dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM memiliki beberapa ukuran status atau klasifikasi, mengingat ukuran itu memunculkan indikator-indikator dalam faktor-faktor yang mempengaruhi IPM akan menentukan bagaimana kualitas sumber daya manusia suatu negara (Lestari & Sanar, 2018).

Agenda prioritas pembangunan nasional saat ini mengusung cita-cita dan semangat perjuangan Soekarno yang disebut "Nawacita", yaitu sembilan agenda prioritas untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Isi gagasan Nawacita adalah pemerataan ekonomi untuk pembangunan infrastruktur sebagai dialektika pembangunan (Soleman & Noer, 2017). Pada butir ke-lima nawacita mengarahkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program yang telah direncanakan oleh pemerintah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukan bagaimana keadaan pembangunan suatu negara bervariasi dari waktu ke waktu serta dalam perbandingan dengan negara lain (Lind, 2019; Edeme *et al*., 2017). Kemajuan pembangunan manusia merupakan pencapaian penting suatu negara, dengan sendirinya layak untuk diakui. IPM digunakan sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja utama Dana Insentif Daerah (DID) dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika upaya pembangunan manusia suatu negara akan mendukung tujuan kebijakan yang bertujuan mencapai pembangunan berkelanjutan, maka pola pengeluaran publik yang memiliki dampak distribusi terhadap pembangunan manusia di tingkat sub-nasional harus dinilai atau diperhatikan.

Dalam satu dekade ini, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Berdasarkan laporan IPM Tahun 2019, IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,92 pada tahun 2019 (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, 2019). Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,87 persen per tahun dan meningkat dari level "sedang" menjadi "tinggi" sejak tahun 2016. Pandemi Covid-19 telah membawa sedikit

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Indonesia. Dalam laporan IPM Tahun 2020, IPM tahun 2020 tercatat sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,53 persen (Badan Pusat Statistik, 2020). Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2010–2020 menjadi sebesar 0,78 persen per tahun.

Pada laporan IPM Tahun 2020 terobservasi beberapa faktor yang dipandang bisa mempengaruhi capaian nilai IPM, yaitu angka harapan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat diperoleh terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam laporan IPM Tahun 2020 dinyatakan selama periode 2010 hingga 2020 angka harapan hidup telah meningkat sebesar 1,66 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun (Badan Pusat Statistik, 2020). Seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19, umur harapan hidup Indonesia mengalami perlambatan, dimana pada tahun 2020 angka tersebut tumbuh 0,18 persen atau melambat dibandingkan pertumbuhan selama tahun 2017–2019 yang masing-masing mencapai 0,23 persen, 0,20 persen, dan 0,20 persen.

Pengetahuan sebagai dimensi pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah penduduk usia 7 tahun serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas (Badan Pusat Statistik, 2020). Dalam laporan IPM Tahun 2020, kedua indikator ini dinyatakan terus meningkat dari tahun ke tahun; namun pada tahun 2020 keduanya mengalami perlambatan dalam laju pertumbuhannya. Dimensi ketiga yang dianggap mewakili kualitas pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada laporan IPM Tahun 2020, nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan yaitu sebesar Rp. 11.013.000, sedangkan pada tahun 2019 nilai pengeluaran perkapita Indonesia tersebut mencapai Rp. 11.299.000 per tahun; atau terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,53 persen (Badan Pusat Statistik, 2020).

Penelitian ini akan meneliti bagaimana dimensi-dimensi pembentuk IPM, yaitu dimensi umur harapan hidup, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak, berkontribusi dalam pembentukan IPM menggunakan teknik analisis data *confirmatory factor analysis*. Teknik ini juga berfungsi mengonfirmasi keterkaitan antar dimensi pembentuk IPM dengan indikator-indikatornya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi arahan sebagai bahan pertimbangan dalam memberi kebijakan beberapa sektor yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam rangka menaikan nilai dari IPM, demi mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi.

TELAAH LITERATUR

Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan *Human Development Report*. Munculnya gagasan tentang pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP tersebut bukan hanya menempatkan manusia sebagai input dari pembangunan, tetapi juga menjadi tujuan akhir pembangunan. Pemahaman tujuan akhir pembangunan tersebut yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk produktif sehingga dapat memiliki umur panjang dan hidup sehat, menguasai pengetahuan, dan memenuhi standar hidup yang layak (Badan Pusat Statistik 2020). Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia (Mirza, 2011).

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Menurut UNDP, IPM dibangun melalui pendekatan tiga variabel dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), serta standar hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga variabel ini dijelaskan sebagai berikut.

Dimensi pertama adalah umur panjang dan hidup sehat, atau yang sekarang disebut umur harapan hidup, diwakili oleh Angka Harapan Hidup (AHH). Angka ini merupakan indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Menurut Statistik Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu (Sugiantari & Budiantara, 2013). Penduduk adalah kekayaan nyata suatu bangsa. Perkembangan penduduk baik secara kualitas maupun kuantitas dipengaruhi oleh banyak faktor. Kualitas hidup yang dimiliki suatu negara ataupun wilayah, menggambarkan kesejahteraan rakyat dan keberhasilan dari program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia. Berkaitan dengan kualitas hidup yaitu terdapat unsur angka harapan hidup (AHH) di dalamnya (Ardianti *et al*., 2015).

Dimensi kedua yaitu pengetahuan. Dalam dimensi pengetahuan ini, pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Sanggelorang *et al*., 2015). Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia (SDM), pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan SDM, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian Manusia (Notoatmodjo, 2012). Penghitungan variabel pendidikan mencakup dua indikator yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, 2019).

Dimensi ketiga yaitu standar hidup layak. Standar ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Indeks ini menunjukan berapa sesungguhnya tingkat kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya hingga mereka mampu menjalankan kehidupan ini secara layak. Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan GNP riil yang disesuaikan (UNDP, 1999). PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS. Rata-rata pengeluaran perkapita setahun dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai karakteristik dari serangkaian data tanpa mengambil kesimpulan umum (Ghozali, 2018); sementara penelitian verifikatif pada dasarnya menguji kebenaran melalui pengumpulan data di lapangan (Arikunto, 2014). Tujuan dari desain ini adalah mengkaji, memberi gambaran, dan menguji kebenaran teori secara empiris dari variabel-variabel yang telah dipilih ke dalam model penelitian. Penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang menggunakan data berbentuk angka atau bilangan

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

yang dapat diolah dan di analisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistika (Sekaran & Bougie, 2017).

Populasi adalah data laporan tahunan survey Indeks Pembangunan Manusia, dengan indikator laten dalam setiap dimensi IPM yaitu rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, jumlah fasilitas pusat kesehatan masyarakat, angka partisipasi sekolah 7-12 tahun, angka partisipasi sekolah 13-15 tahun, angka partisipasi sekolah 16-18 tahun, angka partisipasi sekolah 19-24 tahun, angka melek huruf (persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang melek huruf), persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka penduduk usia 15 tahun ke atas, serta pengeluaran perkapita yang terdapat di masing-masing dari 34 provinsi di Indonesia yang telah di publikasikan oleh BPS. Data yang diambil menjadi sampel adalah selama dua tahun, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder (Sekaran & Bougie, 2017), yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id). Data yang dimaksud berupa laporan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2019-2020. Analisis data dilakukan menggunakan *confirmatory factor analysis* (CFA) yang bertujuan mengkonfirmasi atau memvalidasi apakah indikator yang digunakan sudah sesuai dengan variabelnya. CFA adalah metode untuk mengetahui interdependensi (saling mempengaruhi) antar variabel independen, dalam kerangka yang setidaknya berkisar pada dua pertanyaan utama, yaitu: (1) apakah indikator-indikator yang dikonsepsikan secara tepat, dan konsisten dapat menjelaskan konstruk yang diteliti?; serta (2) indikator-indikator apa yang dominan membentuk konstruk yang diteliti?.

Proses uji yang dijalankan dalam metode CFA meliputi *confirmation of measurement model*, *discriminant validity test*, *construct reliability test*, serta *R-square analysis*. Teknik *confirmation of measurement model* bermanfaat untuk menguji bagaimana variabel-variabel dapat terukur dengan baik dalam menggambarkan bilangan dari faktor; dimana indikator dapat dikatakan valid apabila nilai *loading factor* > 0,4; jika tidak valid, maka indikator tersebut harus dihapuskan dari model (Hair *et al*., 2014).

Discriminant validity test yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki *discriminant* yang memadai dengan melihat angka *cross loading*, dan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model laten berbeda dengan variabel lainnya (Ghozali, 2018). Uji *discriminant validity* dapat dinilai berdasarkan *fornell-larcker criterion* dan *cross loading*. Pada *fornell-larcker criterion*, uji *discriminant validity* dapat dikatakan baik jika akar dari AVE pada konstruk lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi konstruk dengan variabel laten lainnya; sedangkan pada pengujian *cross loading* harus diperoleh nilai indikator yang lebih tinggi dari setiap konstruk dibandingkan indikator pada konstruk lainnya (Sekaran & Bougie, 2017).

Construct reliability test digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur memiliki akurasi dan determinasi pengukuran yang konsisten sepanjang waktu. Penilaian reliabilitas instrumen ditentukan dengan menggunakan dua kriteria, yakni nilai *composite reliability* serta *Cronbach's alpha* untuk setiap blok indikator dalam konstruk reflektif. Sebagai aturan umum, nilai komposit harus lebih besar dari 0,7; namun bila mencapai 0,6 sudah bisa dinyatakan memadai (Hair *et al*., 2014). Tahapan terakhir adalah *R-square analysis* yang bertujuan menjelaskan pengaruh variable laten eksogen spesifik terhadap variabel laten endogen, dimana semakin tinggi nilai maka semakin besar variabel-variabel independen tersebut mampu menjabarkan variabel endogen (Hair *et al*., 2014; Ghozali, 2018).

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

HASIL ANALISIS

Hasil analisis awal dalam *confirmatory factor analysis* (CFA) mengidentifikasi derajat validitas pada masing-masing variabel laten yang dicakup dalam model penelitian ini. Variabel laten yaitu variabel yang diukur dari beberapa indikator. Apabila nilai *loading factor* yang diperoleh lebih dari 0,4 maka indikator dapat dikatakan valid; jika tidak valid maka indikator bersangkutan harus dihapuskan dari model (Hair *et al*., 2014). Hasil perhitungan yang diperoleh menggunakan *software* Smart PLS 4.0 ditunjukkan pada Gambar 1.

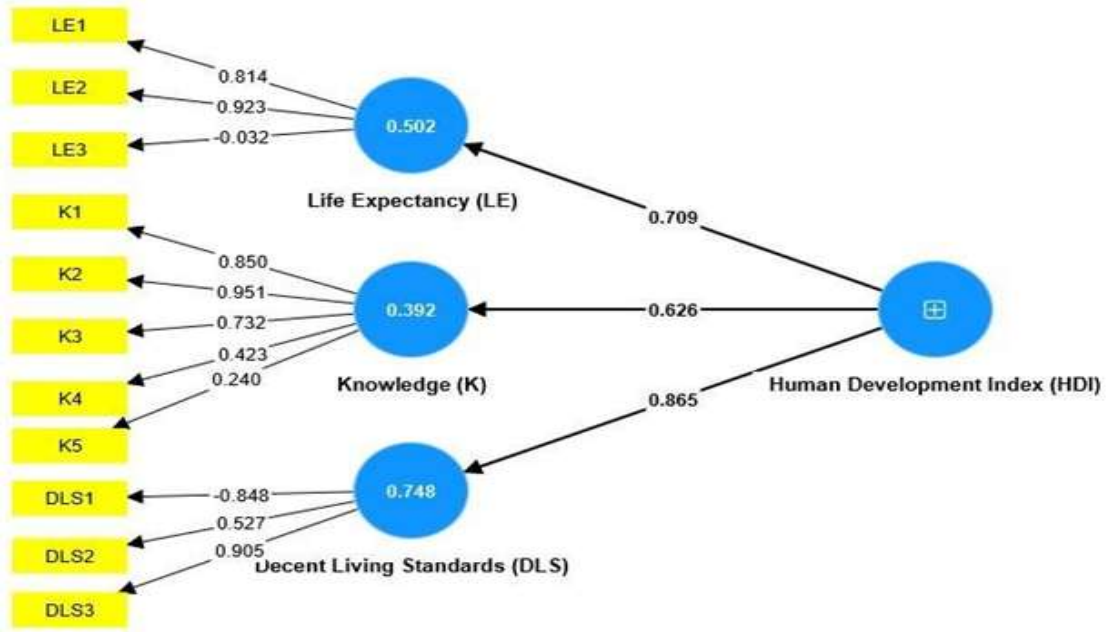
Variabel laten yang dicakup dalam model meliputi Angka Harapan Hidup (LE = *Life Expectancy*), Pengetahuan (K = *Knowledge*), serta Standar Hidup Layak (DLS = *Decent Living Standards*), dengan masing-masing indikator sebgai berikut. LE1 adalah kategori rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak (*access to improved water*), yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi (mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung), serta air hujan. LE2 adalah kategori rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, dimana sanitasi layak adalah fasilitas BAB sendiri/bersama, jenis kloset: leher angsa, serta tempat pembuangan: septik tank/SPAL. LE3 yaitu fasilitas kesehatan (Puskesmas), dimana jumlah pusat kesehatan masyarakat menggambarkan upaya pemerintah dalam pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan primer.

K1 adalah angka partisipasi sekolah 7-12 Tahun, dimana angka partisipasi sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase (pengertian ini mewakili point e, f, dan g). K2 adalah angka partisipasi sekolah 13-15 Tahun; K3 adalah angka partisipasi sekolah 16-18 Tahun; serta, K4 adalah angka partisipasi sekolah 19-24 Tahun. K5 adalah angka melek huruf, yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya.

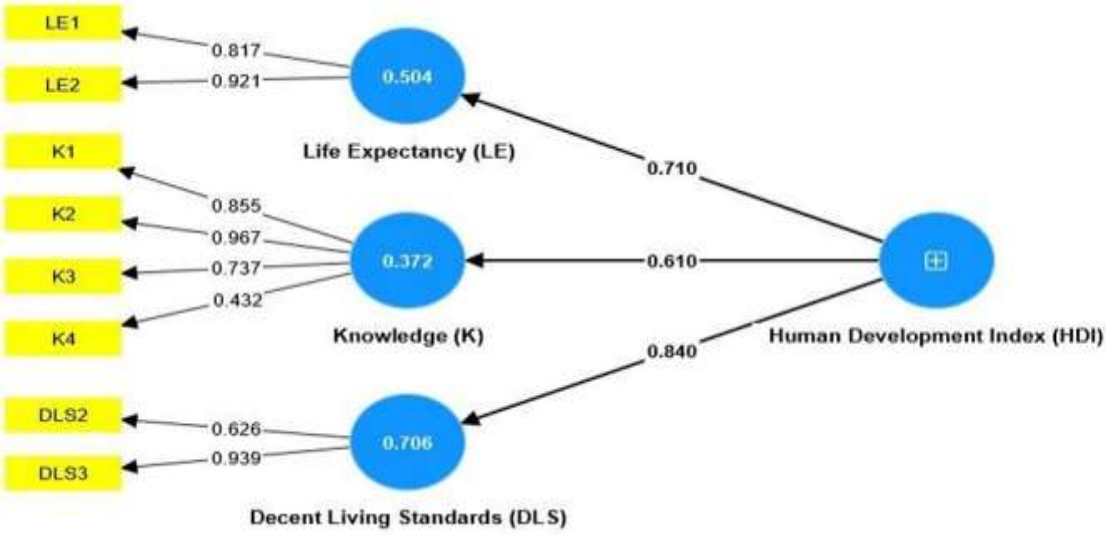
DLS1 adalah persentase penduduk miskin, yaitu kelompok penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. DLS2 adalah tingkat pengangguran terbuka penduduk usia 15 tahun ke atas, yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka meliputi orang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sudah punya pekerjaan tetapi belum dimulai bekerja. DLS3 adalah pengeluaran perkapita, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Jika dilihat pada Gambar 1 teridentifikasi bahwa pada masing-masing variabel laten terdapat tiga indikator yang nilai *loading factor*-nya kurang dari 4, yaitu LE3, K5, dan DLS1. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka ketiga indikator tersebut (LE3, K5 dan DLS1) harus dikeluarkan dari model. Setelah ketiga indikator yang tidak valid itu dikeluarkan, maka diperoleh model baru seperti pada Gambar 2. Teridentifikasi hasil analisis berdasarkan Gambar 2 bahwa semua indikator pada semua variabel laten sekarang telah memiliki nilai loading factor lebih besar dari 0.4, sehingga dinyatakan bahwa semua indikator dari variabel-variabel laten yang dicakup di dalam model penelitian ini telah memenuhi kriteria valid dan dapat dilanjutkan kepada tahapan analisis berikutnya dari CFA.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)



Gambar 1. Hasil Analisis Awal
Sumber: Data sekunder (diolah), 2022.



Gambar 2. Hasil Analisis Setelah Pengurangan Indikator
Sumber: Data sekunder (diolah), 2022.

Berdasarkan Gambar 2 juga diperoleh bahwa indikator LE2 (rumah tangga memiliki sanitasi layak) merupakan indikator yang paling kuat dalam mencerminkan variabel laten Angka Harapan Hidup. Kemudian, indikator K2 (angka partisipasi sekolah usia 13-15) merupakan indikator paling kuat dalam mencerminkan variabel laten Pengetahuan; serta, indikator DLS3 (pengeluaran perkapita) merupakan indikator paling kuat mencerminkan variabel laten Standar Hidup Layak.

Selanjutnya, dilakukan pengukuran derajat kesesuaian pada ketiga variabel laten berdasarkan perhitungan *composite reliability* serta *variance extract*. Kriteria yang digunakan adalah bila nilai CR berada pada *range* 0,70 sampai 0,90 maka variabel laten bersangkutan dinilai reliabel dan dapat digunakan dalam proses penelitian ini (Hair *et al*., 2014). Pada *first order* diuji untuk variabel laten Angka Harapan Hidup, Pengetahuan serta Standar Hidup Layak; selanjutnya pada *second order* diuji untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Tabel 1. Hasil *Composite Reliability* (CR) dan *Average Variance Extracted* (AVE) *First Order*

Variabel	CR	AVE
Angka Harapan Hidup	0,764	0,758
Pengetahuan	0,913	0,599
Standar Hidup Layak	0,771	0,636

Sumber: Data sekunder (diolah), 2022.

Tabel 2. Hasil *Composite Reliability* (CR) dan *Average Variance Extracted* (AVE) *Second Order*

Variabel	CR	AVE
IPM	0,904	0,873

Sumber: Data sekunder (diolah), 2022.

Tabel 3. Hasil *R-Square Analysis*

Variabel	*R-Square*	*R-Square Adjusted*
Angka Harapan Hidup	0,504	0,496
Pengetahuan	0,372	0,363
Standar Hidup Layak	0,706	0,702

Sumber: Data sekunder (diolah), 2022.

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh seluruh variabel laten yang diukur dalam penelitian ini memiliki nilai *composite reliability* lebih dari 0,7 sehingga dinyatakan semua variabel laten telah reliabel. Variabel Angka Harapan Hidup memiliki nilai AVE sebesar 0,758 yang menunjukan bahwa rata-rata 75,8 persen dari informasi yang terkandung dalam setiap indikator dapat direpresentasikan melalui variabel laten ini. Selanjutnya diikuti oleh variabel Pengetahuan yang memiliki nilai AVE sebesar 59,9 persen; dan terakhir adalah variabel Standar Hidup Layak yang memiliki nilai AVE sebesar 63,6 persen.

Pada analisis *second order*, berdasarkan Tabel 2 diperoleh variabel IPM memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,904 atau lebih besar dari 0,7 yang berarti bahwa variabel ini diniliai sudah reliabel. Tabel 2 juga menyatakan bahwa variabel ini memiliki nilai AVE sebesar 0,873 yang berarti bahwa hubungan antar dimensi pada variabel laten IPM cukup kuat.

Terakhir, hasil analisis pada Tabel 3 menunjukkan bahwa Standar Hidup Layak merupakan variabel atau dimensi yang paling kuat dalam mempengaruhi IPM karena memiliki nilai *R-Square* tertinggi yaitu 0,706. Artinya sebesar 70,6 persen dari IPM bisa dijelaskan oleh Standar Hidup Layak, sedangkan sisanya sebesar 29,4 persen (= 100 - 70,6 persen) dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain. Lebih jauh, dimensi Pengetahuan mempengaruhi IPM sebesar 37,2 persen, serta dimensi Angka Harapan Hidup mempengaruhi IPM sebesar 50,4 persen.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang sebelumnya dilakukan, maka pada bagian ini dibahas bagaimana hubungan antara masing-masing dimensi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka Harapan Hidup

Pada tahun 2020 umur harapan hidup Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 0,18 persen; sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 0,20 persen.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2018, 2019 dan 2020, Sulawesi Barat menjadi provinsi yang paling rendah nilai umur harapan hidupnya, sedangkan DI Yogyakarta menempati provinsi dengan nilai tertinggi dalam nilai umur harapan hidup. Harapan hidup saat lahir di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2019 adalah yang tertinggi di Indonesia mencapai 74,92 tahun, sementara di Provinsi Sulawesi Barat adalah terendah yaitu 64,82 tahun. Dimensi umur panjang dan hidup sehat terbentuk dari beberapa indikator diantaranya sumber air minum bersih; dimana berdasarkan survei yang dilakukan BPS pada tahun 2020 diperoleh pemenuhan kebutuhan air minum bersih di Yogyakarta mencapai 79,93 persen, sedangkan di Provinsi Sulawesi Barat hanya mencapai 63,70 persen.

Indikator selanjutnya dari dimensi ini yaitu rumah tangga yang tidak memiliki akses fasilitas buang air besar. Pada Provinsi DI Yogyakarta diidentifikasi hanya 0,41% yang tidak memiliki fasilitas buang air besar, namun di Provinsi Sulawesi Barat diperoleh sebesar 15,88 persen. Faktor lain yang mampu meningkatkan derajat kesehatan dari manusia adalah kemudahan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik, secara total desa/kelurahan yang memiliki fasilitas kesehatan mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 69,72 persen atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 72,42 persen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saat ini maka hal yang perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan capaian dimensi umur harapan hidup, yaitu meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. Agar angka harapan hidup menunjukkan trend yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka diperlukan pemerataan penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana pada fasilitas kesehatan serta masih kurangnya tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis sehingga perlu ditingkatkan untuk menunjang kualitas kesehatan penduduk (Siswati & Hermawati, 2018). Selain itu, peningkatan IPM dapat dilakukan dengan cara meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS), jumlah sarana kesehatan, persentase rumah tangga dengan akses air bersih, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan PDRB perkapita (Melliana & Zain, 2013).

Pendidikan

Indikator pembentuk dimensi pengetahuan diidentifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2020 indikator tersebut mengalami pertumbuhan lebih lambat. Indikator harapan lama sekolah pada tahun 2019 meningkat sebesar 0,04 persen, sedangkan tahun 2020 hanya meningkat sebesar 0,03 persen. Papua menjadi provinsi dengan IPM berbasis indikator harapan lama sekolah yang paling rendah di Indonesia, dimana pada tahun 2018 umur harapan lama sekolah yaitu 10,83 persen, pada tahun 2019 mencapai 11,05 persen, sedangkan tahun 2020 mencapai 11,08 persen. Berbeda dengan provinsi DI Yogyakarta menempati nilai tertinggi dalam indikator harapan lama sekolah dimana pada tahun 2018 sebesar 15,56 persen; tahun 2019 sebesar 15,58 persen, dan pada tahun 2020 sebesar 15,59 persen.

Indikator selanjutnya dari dimensi pendidikan yaitu indikator rata-rata lama sekolah. Papua menjadi provinsi dengan IPM berbasis indikator rata-rata lama sekolah yang paling rendah di Indonesia; dimana pada tahun 2019 yaitu 6,65 persen, sedangkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,69 persen. Berbeda dengan provinsi DKI Jakarta yang menempati nilai tertinggi dalam indikator rata-rata lama sekolah yaitu pada tahun 2019 sebesar 11,06 persen, kemudian pada tahun 2020 yaitu 11,13 persen. Pada tahun 2019, Provinsi Papua masih menjadi sorotan utama karena ketimpangan

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

dalam bidang pendidikan; dimana Nduga menjadi kabupaten dengan capaian terendah di Provinsi Papua dengan harapan lama sekolah hanya sebesar 2,95 tahun. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penduduk usia tujuh tahun di Kabupaten Nduga hanya memiliki harapan sekolah selama 2 tahun saja, sedangkan sekolah dasar setidaknya membutuhkan waktu 6 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saat ini maka pendidikan dinilai memiliki prioritas yang penting untuk diperhatikan, diantaranya tentang sarana dan fasilitas yang tersedia. Hal ini menunjukan bahwa dengan mencapai tingkat pendidikan yang tinggi maka capaian IPM pun akan semakin tinggi, sehingga pembangunan dan capaian pembangunan manusia bisa merata di seluruh Indonesia. Dalam pembangunan, aspek pendidikan dipandang sebagai penggerak indeks pembangunan manusia ini bersifat benar bahwasanya jika taraf pembangunan aspekpendidikan suatu daerah sudah maksimal dirasa indeks pembangunan manusia juga dipandang bisa maksimal (Herdiansyah & Kurniati, 2020). Temuan empiris milik Ezkirianto & Findi (2013) menunjukan bahwa secara umum, variabel-variabel rata-rata lama sekolah, belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan serta PDRB per kapita memiliki pengaruh bersifat positif terhadap IPM. Dengan demikian, dampak dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah direkomendasikan bahwa proses pembangunan aspek pendidikan yang dilaksanakan secara maksimal akan mendapatkan hasil yang maksimal pula untuk IPM yang ada di Kota Bandung.

Standar Hidup Layak

Selama periode tahun 2019 sampai 2020, Papua menjadi provinsi dengan standar hidup layak yang paling rendah di Indonesia yang dicerminkan oleh pengeluaran perkapitanya, sedangkan Provinsi DKI Jakarta menempati nilai tertinggi pada periode tersebut. Dimensi standar hidup layak bisa dilihat dari beberapa indikator, salah satunya yaitu angka kemiskinan pada suatu daerah. Pada tahun 2019 dan 2020, DKI Jakarta memiliki angka kemiskinan masing-masing sebesar 3,42 persen dan 4,69 persen; sedangkan provinsi Papua mencapai angka kemiskinan yang jauh berbeda dengan DKI Jakarta yaitu 26,55 persen dan 26,80 persen. Selain itu, indikator standar hidup layak juga dapat dilihat dari indikator jumlah penduduk yang bekerja atau yang memiliki pekerjaan; dimana pada tahun 2019 dan 2020 di Provinsi DKI Jakarta terdapat lebih dari 4 juta penduduk yang memiliki pekerjaan, sedangkan Provinsi Papua memiliki jumlah penduduk yang bekerja tidak lebih dari 1,8 juta orang. Perbedaan tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap capaian pembangunan manusia dari masing-masing daerah itu.

Indikator lainnya yang perlu diperhatikan adalah pengeluaran konsumsi yang dinilai memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM khususnya di Asia (Vildzah & Muhammad, 2016; Syofya, 2018). Hasil ini menunjukkan bahwa ketika pengeluaran konsumsi meningkat maka IPM sebagai alat ukur kesejahteraan penduduk juga akan mengalami peningkatan. Secara simultan, beberapa ahli menemukan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Selain itu, salah satu permasalahan yang cukup pelik dalam dimensi standar hidup layak yaitu indikator pengangguran. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berada di angka 5,23 persen. Berdasarkan data Sakernas bulan Agustus 2019, setidaknya terdapat sekitar 7 juta pengangguran di Indonesia dimana persentase pengangguran dengan pendidikan menengah ke atas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tingginya pengangguran dengan pendidikan tinggi merupakan suatu indikasi adanya ketidakcocokan kompetensi yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

melakukan perbaikan pada sistem pendidikan khususnya pada tingkat perguruan tinggi. Perbaikan tersebut diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang lebih mampu berperan di pasar tenaga kerja saat ini, terlebih untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0.

Indeks Pembangunan Manusia

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Indonesia, yaitu bahwa dalam 3 tahun terakhir nilai IPM Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan meskipun masih termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka IPM Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 0,82 persen, sedangkan pada tahun 2019 dicapai sebesar 0,74 persen atau lebih menurun pada tahun 2020 dimana hanya menjadi 0,03 persen saja. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Tingkat PengangguranTerbuka (TPT). Pada tahun 2020 jumlah penduduk bekerja adalah 128,45 juta orang, berkurang sebanyak 0,31 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya (128,76 juta orang); sedangkan angka TPT mencapai 7,07 persen atau meningkat 1,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,23 persen. Penurunan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan TPT di masa pandemi berdampak lebih jauh terhadap meningkatnya kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2020 saat awal pandemi Covid-19 mulai menyebar di Indonesia adalah mencapai 26,42 juta orang (9,78 persen) atau lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelumnya, dan pada bulan September 2020 bertambah lagi menjadi 27,55 juta orang (10,19 persen).

Provinsi DKI Jakarta selalu memiliki capaian IPM tertinggi. Pada masa pandemi Covid-19, IPM Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan yang terendah selama satu dasawarsa terakhir dengan meningkat 0,01 poin. Perlambatan IPM Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, dimana indikator ini turun sebesar 1,62 persen dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab melemahnya aktivitas ekonomi yang berkontribusi pada perlambatan capain angka IPM Provinsi DKI Jakarta. Sampai dengan akhir tahun 2020, kasus positif Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta adalah yang tertinggi di Indonesia dengan kontribusi sebesar 25 persen dari keseluruhan kasus. Di sisi lain, Provinsi Papua menempati posisi terakhir dalam pencapaian pembangunan manusia dalam kurun waktu 2010-2020; dan bahwa IPM Provinsi Papua pada tahun 2020 juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi penurunan itu tidak terlepas dari dampak pandemi yang meluas di seluruh Indonesia.

Hasil kajian empiris oleh Nurfilah & Satiti (2020) menunjukkan bahwa tantangan perlambatan pertumbuhan IPM selama pandemi Covid-19 terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan usia harapan hidup dan pendidikan, serta menurunnya belanja riil per kapita akibat kontraksi pertumbuhan ekonomi. IPM Indonesia hanya naik 0,03% pada 2020 dibandingkan 2019. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan belanja per kapita akibat melemahnya perekonomian nasional. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat berpengaruh terhadappeningkatan pembangunan manusia. Namun karena pembangunan manusia bersifat jangka panjang, maka IPM di sebagian besar provinsi hanya tumbuh melambat dan tidak sampai mengalami kontraksi seperti pertumbuhan ekonomi. Selain itu, indikator pembentuk IPM lainnya juga masih meningkat sehingga pada tahun 2020 terdapat 24 provinsi yang mengalami peningkatan IPM meskipun peningkatannya tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (Edeme *et al*., 2017). Jika upaya pembangunan manusia suatu negara akan mencakup dan berguna untuk tujuan kebijakan yang bertujuan mencapai

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

pembangunan berkelanjutan, maka dampak pola pengeluaran publik berdampak distribusi terhadap pembangunan manusia di tingkat sub-nasional karenanya harus dinilai atau diperhatikan.

Penelitian terdahulu mengidentifikasi bahwa IPM dipengaruhi oleh dimensinya melalui kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kualitas manusia di setiap daerahnya, yakni kebijakan alokasi dana desa yang dinilai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Rimawan & Fenny, 2019). Hal ini menunjukan bahwa desa sudah mampu menggunakan alokasi dana desa secara efektif untuk mendukung pembangunan desa, serta alokasi dana desa sudah mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia. Fakta ini bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur desa, lembaga pendidikan serta layanan kesehatan yang sudah ada di setiap desa. Namun demikian, alokasi dana desa dinilai tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, dimana teridentifikasi bahwa alokasi dana desa belum mampu mengurangi kemiskinan dikarenakan program yang dilakukan oleh pemerintah desa masih mengedepankan pembangunan infrastruktur, serta kurang berupaya memperbanyak program mengenai pemberdayaan masyarakat.

Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki dan memajukan dimensi-dimensi pembentuk IPM di setiap provinsi, terutama bagi daerah yang masih tertinggal dalam capaian nilai IPM-nya. Melalui kebijakan yang diputuskan, diharapkan derajat kesejahteraan masyarakat bisa lebih cepat tercapai, sehingga kualitas manusia di Indonesia juga bisa menjadi lebih baik lagi sebagai tujuan sasaran dalam pembangunan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini memperoleh bahwa diantara ketiga dimensi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), standar hidup layak merupakan dimensi paling kuat dalam mempengaruhi IPM. Hasil penelitian yang lain yaitu selama tahun 2019 sampai tahun 2020, Provinsi Papua menjadi provinsi dengan standar hidup layak yang paling rendah di Indonesia yang dicerminkan oleh pengeluaran perkapitanya. Beberapa faktor lain yang membuat standar hidup layak provinsi Papua rendah yaitu tingkat pengangguran yang tinggi,dan juga tingkat kemiskinan yang tinggi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi arahan bagi para pemangku kebijakan seperti Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberi kebijakan beberapa sektor yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam rangka menaikan nilai dari Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini diharapkan turut berkontribusi dalam kebijakan pembangunan manusia di Indonesia untuk bisa naik status dari tinggi menjadi sangat tinggi demi mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi.

Namun masih terdapat banyak kelemahan dalam penelitian ini, yaitu rentang waktu tahun penelitian yang masih sedikit. Selain itu juga, masih banyak indikator-indikator lain yang berpengaruh terhadap pembentukan Indeks Pembangunan Manusia yang belum diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menganalisis dan meneliti lebih mendalam mengenai topik Indeks Pembangunan Manusia.

REFERENSI

Acquah-Sam , E. (2021). Developing sports for economic growth and development in developing countries. *European Scientific Journal, ESJ*, *17*(15), 172-216. https://doi.org/10.19044/esj.2021.v17n15p172.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Ardianti, A. V., Wibisono, S., & Jumiati, A. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup di Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. Universitas Jember. https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/63942/ASTRI%20VONITA%20ARDIANTI.pdf?sequence=1.

Arikunto, S. (2014). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks pembangunan manusia 2020. *Laporan*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html.

Badan Pusat Statistik. (2019). Indeks pembangunan manusia 2019. *Laporan*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication/2020/08/28/a180fbf968ecf6fc9fde1d2a/indeks-pembangunan-manusia-2019.html.

Baeti, N. (2013). Pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, *2*(3), 85-98. https://doi.org/10.15294/edaj.v2i3.1984.

Edeme, R. K., Nkalu, C. N., & Ifelunini, I. A. (2017). Distributional impact of public expenditure on human development in Nigeria. *International Journal of Social Economics*, *44*(12), 1683–1693. https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2016-0152.

Ezkirianto, R., & Findi, M. A. (2013). Analisis keterkaitan antara indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, *2*(1), 14-29. https://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/viewFile/19949/13741.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). *A primer on partial least squares structural equation modelling (PLS- SEM)*. Sage Publications.

Hasan, S. Z., & Aziz, S. (2018). Kedah water resources enactment 2008 for sustainable agriculture development. *Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science*, *41*(1), 41-62. http://www.pertanika.upm.edu.my/resources/files/Pertanika%20PAPERS/JTAS%20Vol.%2041%20(1)%20Feb.%202018/03%20JTAS-1108-2017-5thProof.pdf.

Herdiansyah, D., & Kurniati, P. S. (2020). Pembangunan sektor pendidikan sebagai penunjang indeks pembangunan manusia di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, *8*(1), 43–50. https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.2765.

Lestari, W. W., & Sanar, V. E. (2018). Analysis indicator of factors affecting human development index (IPM). *Geosfera Indonesia*, *2*(1), 11-18. https://doi.org/10.19184/geosi.v2i1.7333.

Lind, N. (2019). A development of the human development index. *Social Indicators Research*, *146*(3), 409–423. https://doi.org/10.1007/s11205-019-02133-9.

Melliana, A., & Zain, I. (2013). Indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan regresi panel. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, *2*(2), 237–242. http://dx.doi.org/10.12962/j23373520.v2i2.4844.

Mirza, D. S. (2011). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi & belanja modal terhadap IPM Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, *04*(02), 102–113. https://doi.org/10.15294/jejak.v4i2.4645.

Myint, H., & Krueger, A. O. (2016). *Economic development.* Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/economic-development/Economic-development-as-an-objective-of-policy.

Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan* (*Edisi revisi)*. Rineka Cipta.

Nurfilah, S., & Satiti, S. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap kualitas manusia Indonesia. *Society*, *13*(1), 18–26. https://doi.org/10.20414/society.v13i1.5233.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, *9*(3), 287-295. https://doi.org/10.23887/jiah.v9i3.22539.

Sanggelorang, S. M. M., Rumate, V. A., & Siwu, F. D. J. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *15*(02), 1–11. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/8686.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Research methods for bussiness*. John Wiley & Sons Limited.

Siswati, E., & Hermawati, D. T. (2018). Analisis indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, *18*(2), 93–114. https://doi.org/10.30742/jisa1822018531.

Soleman, M., & Noer, M. (2017). Nawacita sebagai strategi khusus Jokowi periode Oktober 2014 - 20 Oktober 2015. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, *13*(1), 1961–1975. http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/236.

Sugiantari, A. P., & Budiantara, I. N. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup di Jawa Timur menggunakan regresi semiparametrik Spline. *Jurnal Sains Dan Seni PomITS*, *2*(1), D37–D41. http://dx.doi.org/10.12962/j23373520.v2i1.3132.

Syofya, H. (2018). Pengaruh tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, *15*(2), 177-185. https://doi.org/10.31849/jieb.v15i2.1153.

UNDP. (1999). *United nations human development report 1999*. United Nations Development Programme. https://doi.org/10.4135/9781412973809.n151.

Vildzah, N., & Muhammad, S. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di negara miskin Asia dan Afrika. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, *1*(2), 429-437. https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/5836/2496.